

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERSEROAN PADA PT ANGKASA PURA II (STUDI KASUS PADA DIVISI AIRPORT LEARNING CENTER)

Siti Bunga Nurjanah, Nida Handayani

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KHA. Dahlan, Cirende, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

Email : sitibunganurjanah.27@gmail.com

Abstract

One of Indonesia's state-owned businesses is PT Angkasa Pura II. For PT Angkasa Pura II, the Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) is something that cannot be solved. To do this, infrastructure must be strengthened, and systems and processes must be automatically upgraded to support GCG implementation. As the basis for improving the Company's performance, Angkasa Pura II is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) values, namely Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The purpose of this study is to describe how strong corporate governance is applied at PT Angkasa Pura II Airport Learning Center Division. Qualitative descriptive research method was adopted in this study. The results of this study indicate that PT Angkasa Pura II Airport Learning Center Division has successfully implemented good corporate governance.

Keywords: *Implementation of Good Corporate Governance (GCG), Company Performance, Governance*

Abstrak

Salah satu bisnis milik negara Indonesia adalah PT Angkasa Pura II. Bagi PT Angkasa Pura II, Komitmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang tidak dapat dipecahkan. Untuk melakukan ini, infrastruktur harus diperkuat, dan sistem serta proses harus secara otomatis ditingkatkan untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG). Sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja perseroan, Angkasa Pura II berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan seberapa kuat tata kelola perusahaan yang diterapkan di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center. Metode penelitian deskriptif kualitatif diadopsi dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center telah berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata kunci: Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Kinerja Perseroan, Tata Kelola

LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Istilah "tata kelola perusahaan yang baik," atau GCG, mengacu pada sistem yang mencakup kontrol bisnis melalui peran pengawasan, peraturan, dan manajerial serta kerangka interaksi yang jelas antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa menghalangi kepentingan pemangku kepentingan. sependapat dengan pernyataan Zarkasyi (2008: 36) bahwa GCG adalah sistem dan kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan yang berbeda, terutama dalam arti terbatas hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Sistem untuk mengendalikan interaksi antar organ organisasi Ini adalah manfaat dari Good Corporate Governance (GCG) yang memungkinkan deteksi instan dan koreksi kekurangan dalam rencana bisnis.

Kelebihan Good Corporate Governance (GCG) adalah: menghindari terjadinya krisis mata uang dari sudut pandang internal memacu pemerintah ke depan memberikan umpan balik positif terhadap penerapan GCG. Salah satunya adalah pembentukan komite. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Nasional (KNKCG) Dengan Keputusan Agustus 1999 Menteri Ekonomi dan Keuangan dan industri nomor KEP.10/M.EKUIIN/08/1999. Komite Yang Bertanggung Jawab untuk membuat pedoman GCG Kemudian pindah ke Tata Kelola Komisi Kebijakan Nasional (KNKG) November 2004 Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator BidangPerekonomianNo.KEP.49/M.EKON/11/2004.

Perubahan ini Gagasan penerapan tata kelola yang baik di industri Iklan yang diperlukan untuk realisasi Good Corporate Governance (GCG), KNKG terdiri dari subkomite publik dan Subkomite Perusahaan. Mengadopsi pedoman Good Corporate Governance (GCG) Sebagai bahan acuan ketika perusahaan merumuskan kebijakan Operasi sesuai dengan karakteristik Perusahaan.

Mengingat asumsi-asumsi tersebut di atas, tidaklah terduga bahwa permintaan untuk penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh muncul satu demi satu pada tahun 1990-an. Akibatnya, ada pergeseran pandangan perusahaan dari mengukur kesuksesan hanya melalui kinerja keuangan menjadi juga mempertimbangkan manajemen perusahaan yang kuat, yang mencakup pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan bisnis tanpa mengorbankan kepentingan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan yang baik, atau GCG, adalah sistem yang mencakup kontrol bisnis melalui peran pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan dengan kerangka interaksi yang jelas antara pemangku kepentingan.

Salah satu bisnis milik negara Indonesia adalah PT Angkasa Pura II. Bagi PT Angkasa Pura II, dedikasi untuk menerapkan GCG merupakan suatu keharusan yang mendasar. Untuk mencapai hal tersebut, PT Angkasa Pura II harus membangun infrastrukturnya dan terus meningkatkan sistem dan praktiknya untuk mendukung penerapan GCG yang efisien. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, PT Angkasa Pura II berdedikasi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Independensi, dan Kewajaran. Untuk tujuan ini, Perusahaan secara teratur memperbarui prosedur operasi, manual, dan pedoman lainnya untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan serta transformasi program- programnya. Adopsi dan sosialisasi peningkatan ini memperkuatnya.

Penerapan dan kelangsungan hidup jangka panjang GCG sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan sukses, efisien, dan transparan dalam hal ini manajemen dengan harapan bahwa kegiatan rekayasa kinerja perseroan akan akurat mencerminkan nilai asli bisnis. Untuk memastikan integritas kinerja perseroan, tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai standar manajemen. Penerapan GCG akan terus meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, mengoptimalkan nilainya, dan mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif, yang semuanya pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center)”.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat proses, cara, kebijakan, aturan dan lembaga yang mempengaruhi arah, manajemen dan Pengendalian perusahaan atau perusahaan (dalam Susana Iriyani, 2008). *Good Corporate Governance* (GCG) juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan tujuan tata kelola perusahaan. Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI), pengertian *Good Corporate Governance* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Good corporate governance (GCG) lebih banyak ditampilkan untuk sistem kontrol dan manajemen bisnis, GCG lebih menargetkan tindakan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan pemangku kepentingan karena GCG adalah tentang etika, etos kerja dan prinsip kerja yang baik. Ada beberapa interpretasi tentang definisi GCG. Pengertian tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menurut Indra Surya (2006:25) sebagai berikut: Tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui budaya organisasi, nilai, sistem, proses, kebijakan dan struktur menuju tujuan bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif pihak terkait.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran.

Sementara definisi Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah : Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkelanjutan (sustainable) untuk menaikan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

- **Transparency**

Transparansi dapat diartikan sebagai pengungkapan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi penting dan relevan tentang kegiatan perusahaan. Kehadiran transparansi dalam prinsip-prinsip GCG memiliki manfaat belajar dari penerapan prinsip-prinsip tersebut.

- **Accountability**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab badan perusahaan (direksi, direksi, RUPS) sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif. Akuntabilitas diterapkan secara efektif, sehingga fungsi, hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab antara RUPS, Direksi dan Direksi menjadi jelas. Dengan kejelasan ini, perusahaan akan terhindar dari masalah status keagenan.

- **Responsibility**

Tanggung jawab perusahaan adalah mematuhi manajemen perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum dan peraturan yang relevan. Peraturan yang berlaku di sini meliputi peraturan yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan, kesehatan/keselamatan kerja, standar gaji dan persaingan yang adil.

- **Independency**

Independensi merupakan prinsip penting bagi implementasi GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- e. **Fairness**

Dengan kata sederhana, kesetaraan dan keadilan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan merata yang memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran juga mencakup kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, terutama pemegang saham minoritas, dari berbagai bentuk penipuan. Kewajaran diharapkan dapat melindungi perusahaan dari praktik korporasi yang merugikan. Dengan demikian, keadilan menjadi jiwa untuk memantau dan memastikan perlakuan yang adil di antara berbagai kepentingan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, dimana peneliti berupaya mengungkap dan memahami fenomena penerapan good corporate governance principles (GCG) dalam peningkatan kinerja bisnis di PT Angkasa Pura II (studi kasus di Divisi Airport Learning Center).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan merupakan gambaran yang terperinci dan komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. peningkatan kinerja bisnis di PT Angkasa Pura II (studi kasus di Divisi Airport Learning Center) dan terungkap dalam beberapa deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda atau fenomena realitas sosial yang berbeda yang ada di komunitas objek penelitian dan berusaha untuk menyoroti realitas ini. sebagai sifat, karakter, sifat, pola, tanda, atau deskripsi, kondisi, situasi atau fenomena tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan Divisi Airport Learning Center (Persero) PT Angkasa Pura II untuk mengumpulkan data terkait tujuan penelitian, termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam meningkatkan kinerja bisnis di PT Angkasa Pura II (studi kasus di Departemen Airport Learning Center). Juga termasuk dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pemangku kepentingan di lokasi studi yang dianggap berpengetahuan luas dan mewakili masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk merespons secara kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan seta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan sub-sub fokus penelitian hasil dari dua komponen yaitu mengenai Good Corporate Governance dari Peraturan Menteri BUMN NO.Per01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan dari teori Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terbentuklah 5 indikator yang cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, indepedensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).

1. Prinsip transparansi

Informasi yang terjamin dan akurat diperoleh dari proses pengumpulan data sistem digital kita, sehingga data yang diperoleh selalu up-to-date. Hal ini didukung oleh validasi manual untuk memastikan entri data yang dipublikasikan. Di sisi lain, apakah data dapat diambil tepat waktu dapat ditentukan oleh kepuasan pelanggan atau penumpang. Jika kepuasan pelanggan dinilai tinggi yang dicapai dapat diukur.

- **Informasi yang diungkapkan sekarang terbuka**

Informasi di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center disajikan dalam laporan tahunan yang berisi isi laporan berupa visi, misi, tujuan bisnis, strategi bisnis perusahaan, pelaporan keuangan, struktur manajemen, pemegang saham pengendali, sistem manajemen risiko dan bentuk internal. tambah. Sistem kontrol dan pemantauan, sistem GCG, dan - implementasi dan kepatuhan terhadap peristiwa penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Selain itu, semua informasi tentang sistem lelang dan perekrutan karyawan kami diungkapkan di situs web dan media cetak.

- **Akses mudah ke informasi**

Konsep Bandara Digital menyediakan akses mudah ke informasi melalui aplikasi seluler, situs web perusahaan, media cetak dan juga dapat memperoleh informasi dari karyawan yang sedang bertugas atau yang mengunjungi departemen lain.

- **Kelengkapan Informasi**

Dalam laporan kondisi keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh kantor pusat kepada publik, kondisi perusahaan sangat lengkap, dan perusahaan dapat menyajikan gambaran yang jelas dan jelas tentang perusahaan.

- **Pengungkapan Informasi Terbatas**

Pembatasan akses dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. Seperti halnya informasi rahasia, semua karyawan dilarang menyebarkan informasi rahasia. Sistem pemindaian informasi juga melalui proses klasifikasi sebelum diklasifikasikan sebagai informasi umum atau informasi sensitif.

- **Adanya Kebijakan Tertulis**

Setiap aktivitas atau aktivitas yang dilakukan memiliki kebijakan dalam proses tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Dewan dan Peraturan Internasional. Ini mengatur batasan dan wewenang dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan.

- **Mengkomunikasikan Pedoman Proporsional kepada Karyawan Perusahaan**

Pelaksanaan kebijakan tersebut melalui sosialisasi berupa surat edaran untuk setiap lini, keputusan direksi, dan dapat disampaikan secara langsung.

2. Prinsip Akuntabilitas

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center merinci deskripsi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab untuk keputusan dalam Sistem Manajemen Kinerja 'PMS'. disertakan dan ditampilkan. Program menggunakan sistem pemeringkatan KPI (Key Performance Indicator) terhadap tujuan kinerja karyawan.

- **Penyelarasan tugas dan tanggung jawab**

Berdasarkan visi dan misi perusahaan, penugasan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan ditetapkan agar tujuan dan sasaran strategis perusahaan dapat tercapai.

- **Memastikan bahwa semua karyawan kompeten untuk tugas dan tanggung jawabnya**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center memastikan seluruh karyawan kompeten dan kompeten sesuai dengan tugas dan tanggung jawab proses yang diemban. Penyediaan program pelatihan dan pendidikan lanjutan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan keilmuan untuk mempromosikan kompetensi karyawan kami, khususnya dalam bentuk proses seleksi yang tepat berdasarkan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan seluruh karyawan akan menjadi efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan bandar udara;

- **Sistem pengendalian internal sangat efektif bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KAP (Accounting Audit Corporation) untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan bandara. Pemeriksaan internal oleh sistem audit enam bulan yang dibentuk di unit pemantauan.**
- **Ketersediaan indikator kinerja utama sesuai dengan nilai dan strategi perusahaan**

Ketersediaan metrik kinerja karyawan dalam bentuk profil pekerjaan yang unik. Ini dinilai terhadap indeks kinerja utama. Indikator kinerja utama ini menjadi alat manajemen untuk mencapai nilai perusahaan dan tujuan strategis.

- **Adanya sistem reward dan punishment**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas kegiatan yang dilakukan terhadap seluruh karyawan perusahaan. Jumlah bonus yang diberikan dapat ditentukan dengan mengukur Indeks Kinerja Utama. Penerapan sanksi dapat berbentuk pembinaan, namun disiplin diukur dalam prestasi kerja.

- **Komitmen karyawan terhadap etika bisnis dan kode etik**

Seluruh karyawan PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center berkomitmen terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik diterapkan untuk menjaga kualitas layanan dan terciptanya hubungan baik antara mitra bisnis perusahaan.

3. Prinsip Tanggung Jawab

- Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, anggaran dasar, dan kebijakan perusahaan yang berlaku pada Airport Learning Center memiliki dedikasi yang kuat untuk menegakkan persyaratan hukum. Peraturan harus diterapkan dengan baik dan tegas untuk memastikan keselamatan penerbangan. Keselamatan adalah nilai yang tidak dapat didefinisikan dengan cara yang memastikan setiap keputusan didukung oleh landasan hukum yang kuat.

• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Airport Learning Center membantu masyarakat dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tugas sipilnya. sehingga aplikasi ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghasilkan keberlanjutan di lingkungan bandara.

4. Prinsip Independensi

Upaya untuk menghindari tanggung jawab yang melempar, saling mendominasi, dan diganggu oleh kepentingan tertentu di setiap divisi. Airport Learning Center Menerapkan langkah-langkah dalam sistem kerja berupa DJP (Distinct Job Profile), KPI (Key Performance Indicator), dan kode etik (Code of Conduct) yang memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan perusahaan sesuai dengan ketentuan.

- Memastikan penghindaran konflik kepentingan dan pengaruh tekanan kerja

Airport Learning Center memastikan tidak ada potensi konflik kepentingan dan pengaruh tekanan dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Upaya yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah keputusan bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perusahaan melarang terciptanya konflik kepentingan dan pengaruh tekanan.

5. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning dengan penggunaan media bagi seluruh karyawan perusahaan berupa rapat koordinasi, e-mail, meeting tertentu. Media pengiriman juga dapat diberikan langsung melalui atasan masing-masing divisi.

- **Pengungkapan informasi sesuai dengan posisi karyawan**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center menerapkan keterbukaan dalam penyampaian informasi secara umum kepada seluruh karyawan perusahaan. Sementara itu, informasi detail dan detail dapat diperoleh namun disesuaikan dengan kebutuhan.

- **Perlakuan terhadap Karyawan Perusahaan**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning menerapkan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan perusahaan. Perlakuan tersebut setara dan berkeadilan sesuai dengan kontribusi Perseroan. Bentuk perawatannya bisa berupa pemberian kesejahteraan, termasuk bonus penghargaan dan fasilitas tunjangan. Perlakuan juga dapat diberikan dalam bentuk promosi kepada karyawan yang memiliki nilai kontribusi lebih terhadap perusahaan dan memiliki nilai-nilai unggul.

- **Keadilan dan Kesenjangan**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning menerapkan secara adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak pegawai. Pemenuhan didasarkan pada penilaian kinerja melalui reward dan punishment. Implementasi di lingkungan Perseroan telah berjalan dengan baik karena segala komitmen antara manajemen dan karyawan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan pelaksanaannya.

- **Peluang Karir untuk**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugas kepada karyawan. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan tawaran yang diajukan oleh masing-masing pemimpin divisi senior untuk bekerja di bandara lain. Penawaran ini diperoleh dengan promosi dan jalur karir.

- **Jaminan untuk mendaftar secara adil**

PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning selalu bersikap adil kepada seluruh karyawan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat atas komitmen kedua belah pihak. Dengan adanya organisasi sebagai media karyawan yang disebut serikat pekerja, perusahaan dapat memberikan jaminan yang jelas dalam pola jenjang karir berdasarkan SK Direksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika et al (2015) yang menyatakan bahwa transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, meningkatnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang terdiri dari transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajiban, akan meningkatkan kinerja keuangan PT Angkasa Pura II (Persero). Studi lain yang dilakukan oleh Yudokusumo (2014) menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning telah berjalan optimal. Tata kelola perusahaan yang baik yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan keadilan telah dipenuhi oleh PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning melalui implementasi di lingkungan kerja. Ada 3 prinsip yang menonjol, yaitu prinsip akuntabilitas, tanggung jawab dan kesetaraan serta keadilan. Berdasarkan data tersebut, prinsip akuntabilitas sangat dijaga karena selalu diawasi melalui pencapaian kinerja yang sistematis, berdasarkan prinsip tanggung jawab selalu dilaksanakan melalui alokasi dana yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin melalui peraturan yang dirumuskan oleh aspirasi 2 karyawan media. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning mampu mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat dan lingkungan untuk berjalan dengan baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga terciptalah perusahaan yang sedang berkembang, tumbuh dan sangat kompetitif. Memenuhi amanat Keputusan Menteri BUMN No: Per 01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Perseroan telah melakukan berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat memudahkan proses pengambilan keputusan sehingga akan berlangsung lebih baik dan menghasilkan keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi dan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Hal ini jelas akan memberikan efek yang sangat positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Dengan penerapan Good Corporate Governance, dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning. Tata kelola perusahaan yang baik akan memungkinkan untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang oleh direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentunya akan mengurangi kemungkinan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Dengan penerapan Good Corporate Governance, dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning. Tata kelola perusahaan yang baik akan memungkinkan untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang oleh direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentunya akan mengurangi kemungkinan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Chtorou et al. (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang konsisten akan mencegah kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tercermin dalam laporan keuangannya.

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat meminimalisir biaya keagenan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pemantauan perilaku manajemen itu sendiri. Perusahaan dapat meminimalisir biaya modal, yaitu biaya modal yang harus ditanggung ketika perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal inilah dampak dari manajemen perusahaan yang baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan acuan positif bagi para kreditur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola perusahaan yang baik yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan keadilan telah diterapkan oleh PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning melalui implementasi di lingkungan kerja. Ada 3 prinsip yang menonjol, yaitu prinsip akuntabilitas, tanggung jawab dan kesetaraan serta keadilan. Berdasarkan data tersebut, prinsip akuntabilitas sangat dijaga karena selalu diawasi melalui pencapaian kinerja yang sistematis, berdasarkan prinsip tanggung jawab selalu dilaksanakan melalui alokasi dana yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin melalui peraturan yang dirumuskan oleh aspirasi karyawan media.

Good Corporate Governance yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan keadilan telah dipenuhi oleh PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning melalui implementasi di lingkungan kerja.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan fokus pada Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center) :

1. Berdasarkan prinsip transparansi, pelaksanaannya dapat dioptimalkan melalui kepastian hukum mengenai ketepatan waktu keterbukaan informasi.
2. Berdasarkan prinsip independensi perlu ada pengawasan langsung di lapangan untuk menghindari konflik kepentingan serta ketentuan yang memuat batasan- batasan yang pasti termasuk pengaruh tekanan dan benturan kepentingan serta sanksi yang diberikan agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tegas.

DAFTAR REFERENSI

Kelvianto, I. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu. *Agora*, 6(2).

Pahlevi, M., & Mawardi, M. K. (2016). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bumh Berorientasi Global (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam Mengelola Thang Long Cement Joint Stock Company)*. Brawijaya University.

Yudokusumo, A. B. (2014). Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2, 1-11.

Juanda, I. (2019). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Mopoli Raya Medan* (Doctoral dissertation).

Sedarmayanti, G. G. (2003). Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Bandung: Mandar Maj*.

Dewi, R. K., & Widagdo, B. (2012). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Manajemen Bisnis*, 2(1).

Maryanti, E., & Fithri, W. N. (2017). Corporate social responsibilty, good corporate governance, kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan pengaruhnya pada nilai perusahaan. *Journal of Accounting Science*, 1(1), 21-37.

Naek, T., & Tjun, L. T. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017: Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 123-136.

Rahmawati, I. A., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan Corporate social responsibility Terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(2), 54-70.